

Percakapan dengan

F. Budi Hardiman



F. Budi Hardiman, pengajar di STF Driyarkara dan Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Ia memperoleh gelar Magister Atrium dan Doktor der Philoshopie dari Hochschule für Philosophie, München, Jerman.

Pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi berkait erat dengan pemisahan antara ruang privat dan publik dalam liberalisme, yang menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme, liberalisme dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menganut bentuk-bentuk kehidupan tertentu. Liberalisme pun menegaskan: setiap pengambilan kebijakan publik harus dipisahkan antara problem-problem yang menyangkut publik secara luas (tanpa membedakan agama, etnisitas, dan orientasi politik) dengan bentuk-bentuk kehidupan spesifik. Itulah yang disebut sebagai *the problem of justice*. Maka, model ideal yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat demokratis, pluralistik, dan multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal, dan toleran.

Sekularisme terlahir dengan sejarah yang berdarah-darah. Namun demikian, di samping ia memberikan jalan untuk terciptanya kemajuan, baik di bidang pengetahuan maupun politik dan hal-hal positif lainnya, di berbagai tempat dan oleh banyak kalangan ia juga ditolak dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah penolakan atau lebih tepatnya kekhawatiran dari kalangan agamawan bahwa pada akhirnya sekularisme hanya akan menimbulkan sikap antiagama. Untuk menjembatani tarik menarik isu seputar sekularisme itu, beberapa kalangan membuat distingsi signifikan antara sekularisme sebagai sebuah ideologi dan sekularisasi sebagai proses. Bagaimana Anda mengomentari hal itu?

Menurut hemat saya, sekularisasi itu berbeda dengan sekularisme. Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi-institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi. Namun sikap eksekif dari sekularisasi menimbulkan suatu anggapan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan agama akan langsung dikaitkan dengan absolutisme agama Abad Pertengahan di Eropa. Berbeda dari sekularisasi, sekularisme bukanlah sebuah proses sosiologis, melainkan sebuah ideologi, yaitu suatu bentuk pandangan sempit yang beranggapan bahwa hanya proses-proses dalam kehidupan material yang ada di dunia kita inilah yang riil, sementara dimensi transendental, dimensi-dimensi yang bersifat adi-kodrati dalam hidup manusia dianggap sebagai bukan bagian dari realitas yang bisa diterima. Dalam arti ini, sekularisme dapat mendorong baik kepada tendensi-tendensi yang bersifat ateistik maupun yang bersifat deistik. Keduanya, baik ateisme maupun deisme, memusatkan diri pada kehidupan material di dunia ini – entah dengan cara menolak adanya dunia transendental, dalam kasus ateisme; ataupun menganggap bahwa dimensi transendental, dalam hal ini adalah Tuhan, tidak berperan langsung di dalam sejarah sebagaimana dimengerti oleh deisme. Pengertian inilah yang berkembang dalam sejarah Eropa sejak abad ke-18, baik di Inggris (deisme) maupun Prancis (ateisme dan materialisme).

Kata sekularisme itu sendiri adalah ‘tipe ideal’ (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demi-

kian kita tidak bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistis. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang berpandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transendental. Adakah orang seperti itu? Kita tak tahu isi hati orang. Andaikan orang seperti itu ada, tentulah dia begitu tidak peduli dengan ‘hati’-nya sebab ‘hati’ ini berciri transendental. Jadi, kita tidak dapat memastikan soal ini dari luar. Jika kita bicara tentang sekularisme, acuan kita bukan pada pengumuman eksistensial itu, melainkan pada politik. Kita harus membatasi percakapan kita pada politik, yakni kehidupan bersama di dalam Negara.

Bentuk konkret dari institusi sekularisme adalah pemisahan sama sekali, bahkan penyingkiran, dimensi religius dari kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga ada sikap permusuhan dengan agama atau segala yang berbau religius. Praktik seperti pelarangan pemakaian jilbab di Prancis, negara yang sejak awal masa Pencerahan abad ke-18

Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi-institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi.

dikenal memiliki tendensi ateistik dan materialistis yang cukup kuat dalam proses sekularisasinya, adalah wujud dari politik sekularistis dan bukan sekedar sekular.

Pembedaan antara ruang publik dan ruang privat dalam sekularisme apakah sama atau tidak dengan pembedaan antara the problem of justice sebagai wilayah negara an sich dan the problem of good life sebagai wilayah individu atau agama. Apakah keduanya tidak boleh saling campur tangan, sehingga harus selalu dipisahkan?

Pertama-tama kita harus membedakan antara sekularisme dan liberalisme juga pluralisme, meskipun ketiga hal tersebut saling berkorelasi

satu sama lain. Dalam sejarah perkembangannya, kalau kita bisa petakan, yang disebut liberalisme itu setua zaman modern atau modernisasi itu sendiri. Liberalisme adalah ideologi modern *par-excellence*. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antarmanusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme itu, liberalisme dikaitkan juga dengan kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan untuk menganut bentuk-bentuk kehidupan (*form of life*) tertentu. Oleh karena itu, yang sentral dalam liberalisme adalah pemisahan antara ruang publik dan ruang privat.

Mengapa demikian? Karena berabad-abad totalitarianisme agama di Abad Pertengahan Eropa telah dilihat sebagai tidak adanya pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Otoritas politis, pada masa itu, menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk mengarahkan sikap-sikap individual dalam nilai-nilai yang sangat personal, seperti agama, etika dan sebagainya. Akibatnya kekuasaan negara menjadi berlebihan. Ditambah lagi Eropa di awal jaman modern telah mengalami perang agama antara Katolik dan Protestan selama tiga dasawarsa. Salah satu hikmah dari perang agama yang kemudian ditarik oleh liberalisme adalah asas netralitas politik dari pandangan-pandangan hidup spesifik keagamaan. Di dalam perang agama ada klaim-klaim kemutlakan dari masing-masing agama yang saling berbenturan dan ingin memaksakan kalim-klaim itu kepada penganut agama lain. Hal itu menurut liberalisme hanya bisa diatasi dengan pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Pemisahan kedua hal itu sendiri, berbeda dengan pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi, meskipun keduanya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama.

Yang disebut *the problem of justice* dan *the problem of good life* itu berasal dari diskursus etika politik abad ke-20 antara golongan liberalisme dan komunitarianisme, sebagaimana terjadi antara Michael Sandel, Alasdair McIntyre dan Charles Taylor di satu pihak dan John Rawls di lain pihak. Buku Sandel *Liberalism and the Limit of Justice* dan buku Rawls *A Theory of Justice* sangat sentral dalam diskusi itu. Diskusi itu sendiri, sejatinya, lebih matang dan progresif daripada liberalisme klasik. Duduk perkaranya

adalah bagaimana kita, dalam masyarakat modern yang sangat kompleks, dengan macam-macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai di dalamnya, tetap bisa memiliki kehidupan bersama secara politis yang damai dan saling mengerti satu sama lain. Kaum komunitarian mengedepankan kembali peranan nilai-nilai yang berakar pada komunitas konkret dan menolak konsep abstrak liberalisme tentang individu. Kontroversi ini di Jerman direspons oleh Jürgen Habermas yang mencoba mencari 'jalan tengah' lewat teori diskursus negara hukum demokratis dalam bukunya yang berjudul *Faktizität und Geltung* (terjemahan Inggris *Between Fact and Norm*).

Liberalisme abad ke-20 mencapai suatu sikap bahwa dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik harus dipisahkan antara problem-problem yang menyangkut publik secara luas tanpa membedakan agama, etnisitas atau orientasi politis dan problem-problem yang menyangkut bentuk-bentuk kehidupan spesifik. Yang pertama itu kurang lebih berciri kosmopolitan dan bersangkutan dengan hukum dan keadilan. Itulah yang disebut sebagai *the problem of justice*.

Cirinya adalah abstrak, tidak terkait langsung pada bentuk-bentuk kehidupan komunitas seperti agama, suku, dan organisasi dengan basis nilai-nilai tertentu. Yang menjadi sentral di sini adalah paham hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu yang disebut *the problem of good life* adalah segala macam bentuk persoalan yang terkait dengan gambaran-gambaran dunia spesifik atau jalan hidup spesifik, misalnya tentang keselamatan hidup (apakah

Kata sekularisme itu sendiri adalah 'tipe ideal' (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistik. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang berpandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transendental.

eksistensiku di dunia ini akan selamat atau tidak), tentang kebahagiaan, tentang karakter, dan keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan gaya hidup yang sangat khusus di dalam sebuah masyarakat. Problem ini berciri partikularistik, berkait dengan komunitas-komunitas tertentu entah agama, etnik, maupun organisasi-organisasi dengan basis nilai tertentu. Kelompok-kelompok yang beragam dalam masyarakat lebih sulit mencapai saling pengertian mengenai *good life* ini daripada mengenai *justice*. Karena itu negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada *the problem of justice*. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dan seterusnya, mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai *fairness* dalam masyarakat majemuk itu. Namun mereka tidak perlu mencari kesepakatan mengenai jalan keselamatan yang secara spesifik ditawarkan secara berbeda-beda oleh agama yang berbeda-beda. Kita bahkan boleh membayangkan penerimaan semacam pasar bebas penyebaran agama sebagai konsekuensi sikap liberal, sejauh misi pentobatan itu menjauhkan diri dari paksaan, manipulasi dan kekerasan. Negara bertindak hanya jika ada kebebasan individu atau kelompok yang dilukai atau jika ada masalah keadilan.

Sekarang marilah kita lihat masyarakat kita yang sangat majemuk. Di situ ada begitu banyak gaya hidup dan orientasi nilai. Sebut saja orang-orang kebatinan, komunitas Muslim, komunitas Kristiani dengan berbagai macam aliran dan praktik di dalamnya, yang masing-masing mempunyai cara berpikir spesifik, dan kelompok berambut *punk* yang juga ada di beberapa tempat. Belum lagi ada suku-suku yang masing-masing mempunyai bayangan-bayangan spesifik tentang bagaimana menjadi bahagia sebagai anggota kelompok-kelompok itu. Kaum kaya dan kaum miskin juga menambah cara kategorisasi sosial itu. Masing-masing memiliki orientasi nilainya yang berkembang lewat ruang dan waktu. Pemuda *punk* mungkin saja merasa berbahagia dengan perlawanannya terhadap kultur mapan. Para penjaga tradisi melihat kebahagiaan dalam pemeliharaan nilai-nilai kultural mereka. Belum lagi yang terkait iman religius, seperti ajaran-ajaran tentang keselamatan final dan kebenaran iman. Semua itu memiliki implikasi praktis dalam organisasi, visi, cara bertindak dan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok lain. Banyak kontradiksi nilai dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, dan nilai-nilai yang dianggap benar oleh satu kelompok tidak dapat diuniversalkan begitu saja untuk

kelompok-kelompok lain, sehingga nilai-nilai itu tetap partikular. Itulah contoh aspek yang disebut *the problem of good life*.

Tentang kemajemukan ini liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filosof Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnya kebahagiaan adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi-orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok-kelompok partikular itu.

Suatu otoritas politis seperti pemerintah negara yang merasa berhak untuk menentukan jalan hidup, kebahagiaan atau keselamatan final para warganya telah mengaburkan batas antara 'membahagiakan' dan 'menindas'. Misi untuk menyelamatkan jiwa dari api neraka yang dilakukan oleh negara macam itu pastilah dialami oleh para individu sebagai teror. Karena itu perpaduan antara agama dan politik di tangan satu otoritas akan mengancam kebebasan sipil warga negara. Doktrin keselamatan suatu agama, jika dipakai sebagai doktrin resmi negara, akan berubah menjadi ideologi keji yang menindas agama-agama lain.

Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama.

Apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap pemisahan absolut, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu. Misalnya, terhadap kalangan pemeluk agama tertentu yang merasa harus menerapkan nilai-nilai yang diyakininya ke dalam aturan legal-formal?

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa distingsi-distingsi itu harus kita terapkan dalam ranah yang berbeda-beda. Kalau berbicara tentang distingsi antara negara dan masyarakat, atau ruang publik dan ruang privat,

kita sedang berbicara secara institusional dan struktural, yakni tentang bagaimana masyarakat liberal menata dirinya. Sedangkan kalau berbicara tentang *the problem of justice* dan *the problem of good life* berarti kita sedang berbicara mengenai macam-macam tema persoalan dan bentuk kebijakan dalam demokrasi. Kita alokasikan di mana problem itu sehingga tidak tercampur satu sama lain, lebih dari kerangka metodologi dan epistemologi. Bila suatu konsensus atas norma publik tertentu merupakan ungkapan kepentingan kelompok tertentu dan tidak mencerminkan kepentingan umum, kita sebut itu sebagai *the problem of good life*, namun bila suatu diskusi melibatkan persoalan yang menyangkut kepentingan kemanusiaan, kita sebut itu *the problem of justice*.

Persoalan yang tadi Anda ajukan adalah apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap absolut pemisahan, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu juga. Itu benar. Namun, liberalisme itu sendiri terus berkembang. Kita bisa melihat bahwa dewasa ini, dari akhir abad ke-20, praktik masyarakat-masyarakat liberal tidak sungguh-sungguh liberal seperti dalam teorinya. Hampir setiap kelompok dalam masyarakat liberal mengklaim diri liberal, meski sebetulnya juga neo-konservatif. Bisa dikatakan bahwa ideologi liberalisme dewasa ini telah mengalami kemerosotan karena variasi-variasi dalam pelaksanaannya. Ide tentang pasar bebas dan sebagainya juga tidak secara murni diterapkan di berbagai negara. Begitu juga soal pemisahan ruang publik dan ruang privat. Sebab banyak kaum liberal sendiri yang justru menentanginya. Kaum feminis, misalnya, sangat tidak nyaman dengan pemisahan itu, karena justru begitu banyak proteksi ketidakadilan atas nama pemisahan itu.

Ada satu diskusi di Amerika dan Eropa tentang asas netralitas yang sangat sentral dalam proses legislasi dalam sistem hukum liberal. Asas itu mengatakan bahwa negara harus bersikap netral terhadap masalah *good life* tadi dan tidak mengintervensi apa-apa yang berada di ranah privat. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga lalu diproteksi dengan suatu alasan bahwa masalah itu adalah masalah privat yang tidak bisa dimasukkan ke dalam diskusi publik, tentu kaum feminis akan sangat berkeberatan.

Lantas, apa makna netralitas itu? Dalam diskusi itu beberapa pihak, seperti Habermas di Jerman, sampai pada kesimpulan bahwa asas netralitas tidak bisa dipahami secara mutlak. Artinya isu-isu di dalam ruang privat juga boleh ditampilkan ke ruang publik sejauh relevan sebagai masalah

publik. Lebih dari itu, karena isu-isu dalam ruang privat terkadang juga bersentuhan dengan masalah keadilan. Tegasnya, isu privat tidak bisa langsung diblokir untuk tidak boleh dibicarakan sebagai diskusi publik. Blokade semacam itu hanyalah alasan untuk melakukan represi terhadap problem-problem yang sebenarnya bisa masuk ke dalam ruang publik. Tetapi, hasil dari diskusi itu, meskipun ada inklusivitas dan *fairness* serta keterbukaan dalam masalah privat yang bisa diangkat ke ruang publik, tidak semua masalah dalam ruang privat bisa mendapat kualifikasi publik. Masalah itu harus terlebih dahulu diuji secara publik, apakah benar-benar bisa masuk ke masalah publik, atau tetap hanya menjadi masalah privat. Misalnya, seorang anak dilecehkan secara seksual oleh bapaknya, atau seorang istri diperkosa di dalam rumah tangganya. Masalah-masalah seperti ini sangatlah subtil. Apakah ini persoalan keadilan atau masalah privat? Determinasi itu haruslah diperiksa di bawah sorotan publik juga. Artinya, dalam diskusi publiklah kekerasan dalam rumah tangga dapat ditentukan sebagai persoalan privat atau publik. Itu tak boleh diblokade oleh aturan hukum begitu saja. Tema tidak boleh dibatasi dengan asas netralitas itu, namun prosedur diskusi publik sedapat mungkin harus tetap netral dari intervensi pemerintah dan kepentingan pasar.

Itu satu hal. Lain hal dengan yang Anda tanyakan. Agama, dalam berbagai ekspresinya, memang boleh berperan di dalam partisipasi demokratis. Kendatipun begitu, yang harus dipastikan sebelumnya adalah mana yang memang menjadi problem privat dan mana yang bisa masuk sebagai problem publik, seperti dalam bidang pendidikan yang cukup dilematis dalam menentukan garis batas privat-publiknya. Pendidikan bersifat publik, karena pendidikan membuka aksesnya kepada publik dan publik bisa secara luas berpartisipasi di dalamnya. Dan mengapa disebut privat? Karena diselenggarakan oleh masyarakat dengan orientasi nilainya masing-masing.

Liberalisme adalah ideologi modern *par-excellence*. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme.

Lalu kalau itu diselenggarakan oleh lembaga agama dengan ekspresi keagamanya yang sangat spesifik, bolehkah lembaga pendidikan ini ikut serta di dalam kebijakan publik pendidikan? Dalam politik sekular jawabannya adalah boleh, sejauh tidak membawa alasan religius ke dalam pengambilan keputusan publik. Misalnya, separasi antara pria dan wanita di dalam sekolah-sekolah dengan alasan norma religius yang melarang persentuhan di antara kedua jender. Masalah seperti itu seharusnya bisa dinalar tidak semata dari sudut teologi moral yang sangat spesifik dalam agama itu, melainkan juga dari sudut hak-hak asasi manusia universal. Dalam terang hak-hak asasi manusia itulah persoalan itu dapat dibahas pada level publik, sementara kebandelan untuk bertahan pada perspektif religius sektarian justru membuat persoalan itu tetap berciri partikular. Ternyata di hadapan norma universal hak-hak asasi manusia, alasan-alasan teologis moral spesifik yang mendasari pengaturan sosial-religius-pedagogis itu tampak sebagai problem ketidaksetaraan jender. Ini merupakan *the problem of justice*, maka menjadi minat publik. Memblokade kebijakan separasi itu sebagai persoalan privat kelompok religius tentulah semacam legitimasi bagi ketidakadilan jender. Publik yang lebih luas daripada komunitas eksklusif yang mengklaim privasi itu berkepentingan untuk mempersoalkan ketidaksetaraan jender. Sebab itu, pemisahan publik dan privat tidak bisa mutlak.

Sebaliknya, alasan-alasan religius kadang juga mengandung nilai-nilai universal. Misalnya, pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama. Di samping ciri eksklusifnya dalam mengklaim solusi keselamatan final, agama-agama juga memiliki ciri inklusif dalam pandangan humanisnya dan keadilan sosial bagi semua manusia. Bagaimanapun modernitas dengan humanisme universalnya turut membebaskan potensi agama-agama untuk melihat manusia lebih luas daripada sesempit umat mereka saja. Vitalitas potensi ini merupakan kontribusi bagi toleransi.

Kembali pada pertanyaan Anda. Sebenarnya pemisahan itu tidaklah *rigid*. Itu hanya cara bicara dan cara memandang yang kemudian masuk ke dalam praktik-praktik hukum, yang masih fleksibel terhadap diskusi terus-menerus.

Ada kekhawatiran yang sangat akut bahwa kalau agama juga ikut terlibat ke dalam wilayah publik, dengan memaksakan nilai-nilainya menjadi aturan publik, yang akan terjadi adalah tindakan eksklusi terhadap agama dan keyakinan yang lain. Tetapi hal itu dibantah dengan contoh lain, bahwa gereja, sebagai simbol agama, seperti di Filipina atau di Amerika justru membantu mendiseminasikan wacana liberalisme. Makanya kemudian ada konsep deprivatisasi. Agama tidak lagi hanya menjadi urusan individu yang selalu berada di ruang privat, melainkan bisa menampakkan wajah publiknya dengan lebih menghargai nilai-nilai liberalisme dan pluralisme. Justru konteks itulah yang paling bisa dipakai untuk saat sekarang. Kita juga mengenal, kendati mungkin masih debatable, ada gagasan pos-sekular. Apakah masyarakat pos-sekular akan membuat wajah baru agama di muka publik menjadi ramah dan toleran; atau seperti apakah masyarakat pos-sekular itu sebenarnya? Dan bagaimana seharusnya wajah publik agama ditampakkan?

Ada sebuah buku baru yang ditulis oleh Peter Sloterdijk yang berjudul *Zeit und Zorn* (Waktu dan Murka). Tesis yang diwawakilinya adalah bahwa masyarakat Barat dibangun atas kemarahan. Filsuf kontemporer ini membuat interpretasi bahwa dari zaman ke zaman isi peradaban Barat adalah revolusi dan kemarahan. Salah satu bentuk kemarahan itu semestinya juga apa yang lalu menjadi

Negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada *the problem of justice*. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dst. mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai *fairness* dalam masyarakat majemuk itu.

liberalisme itu. Maksud saya liberalisme adalah suatu strategi untuk mengatasi suatu eksekse atau trauma yang ada di masa lalu dalam totalitarianisme agama. Untuk menghilangkan totalitarianisme agama, masyarakat Barat bertindak eksekse dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama. Dalam arti ini, jalan sejarah Barat cukup khas. Namun jika menilik bahwa

modernitas di Timur juga berbenturan dengan feodalisme, proses emansipasi untuk menjadi liberal ternyata universal, meski tak harus lewat revolusi seperti di Barat.

Kalau melihat suatu persoalan, kita tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan liberal seolah-olah suatu tongkat ajaib yang dapat menyelesaikannya dengan seketika. Maka menjawab persoalan agama yang hendak ikut serta dalam kebijakan publik pun kita tidak bisa menjawabnya secara hitam putih. Memang peran agama dalam pengambilan keputusan publik tidak pasti mengacaukan. Akan tetapi pastilah mengacaukan jika politik agama itu bersikap picik, tidak dewasa, berkuat dengan perspektif etnosentrisnya, tidak mencoba mentransendensi perspektifnya dengan mengambil alih perspektif kelompok lain, dan bersikeras pada pandangan dunianya yang *immune* terhadap kritik dan masukan dari luar. Bahaya sesungguhnya tidak berasal dari alasan religius itu sendiri, melainkan dari sikap-sikap kaku dan tertutup untuk menolak komunikasi.

Saya membedakan antara para penganut agama pada umumnya dengan para penganut agama yang mengalami kepanikan. Sebut saja orang-orang yang panik ini adalah orang-orang yang tidak tahan melihat kemajemukan dan mencari sistem kepastian yang eksklusif dalam agama mereka. Oleh sebab itu mereka kemudian membentuk suatu pulau sendiri guna mengimmunisasi diri dari luar dan merasa bahwa sudut pandangnya itu adalah yang terbaik dan paling benar. Kalau orang-orang panik ini masuk ke dalam diskusi publik dan ikut campur dalam kebijakan-kebijakan publik bisa berbahaya karena perspektif triumphalistis mereka akan memacetkan dialog.

Fundamentalisme bukanlah sekadar persoalan politis atau ideologis. Ada akar-akar psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang menjadi begitu kaku, sempit dan tertutup dalam keyakinan religiusnya, yakni pencarian kepastian deduktif atas segala persoalan di tengah-tengah kepanikan hatinya berkonfrontasi dengan relativisme nilai dewasa ini. Dalam fanatismenya ia merasa mendapatkan tongkat ajaib untuk menyelesaikan segala persoalan itu. Tentu saja keyakinan semacam itu absurd, sebab dunia di luar kepala sang fanatikus tentulah lebih kompleks dan plural daripada dunia di dalam kepalanya. Kesulitan berdialog dengan mereka disebabkan antara lain oleh mekanisme sistem imun dalam jiwanya

yang sedang panik yang tanpa disadarinya telah beralih menjadi keyakinan berlebihan tentang dogma imannya.

Tetapi orang-orang beragama atau orang-orang beriman tidak semuanya panik seperti itu. Ada yang tenang, *sumeleh*, dan terbuka terhadap bermacam-macam nilai di dalam masyarakat. Bahkan dari agama sendiri ada nilai-nilai universal yang bisa dibangun untuk gerakan seperti yang ada di Filipina. Jadi persoalan sesungguhnya mungkin tidak semata-mata terletak pada agama itu sendiri, tetapi pada proses marginalisasi sosial, ekonomis atau politis. Marginalisasi akan menghasilkan dua sikap, mereka yang panik dan mereka yang, karena kultur dan kedalaman penghayatannya, lebih tenang dan tidak panik. Mereka yang panik, langsung akan merespons dengan fanatisme, merasa bahwa agama menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan. Di sini agama segera berubah menjadi alat kuasa. Yang sakral dalam agama dinodai dengan agresi dan arogansi.

Saya sepakat bahwa cukup banyak gerakan demokrasi di berbagai negara yang dimotori oleh kelompok-kelompok dengan orientasi religius. Karena dalam nilai-nilai agama juga terdapat motivasi untuk bergerak

Liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama.

sebagaimana diperlihatkan oleh Martin Luther King Jr di Amerika Serikat dan Mahatma Gandhi di India. Keduanya membangun *civil courage* dan motivasi untuk berkorban. Menurut hemat saya, semangat dan motivasi semacam itu tidak semata-mata berasal dari liberalisme, melainkan berakar jauh ke dalam spritualitas religius mereka. Liberalisme, jika hanya dimengerti sebagai kebebasan negatif, bahkan bisa menghasilkan krisis motivasi atau *lost of meaning*, seperti banyak diulas dalam teori-teori kritis tentang modernitas. Dalam agama ada sumber tak habis-habis untuk menimba motivasi guna keberanian bertindak dan membangun solidaritas. Jika orang memiliki kedewasaan iman, dari agama manapun orang ini akan memiliki cukup keyakinan diri dan kemantapan untuk menerima perbedaan nilai dalam berbagai agama. Karena itu kedewasaan iman juga memberi kontribusi motivasi yang signifikan untuk formasi keutamaan-keutamaan warga dalam masyarakat demokratis.

Selanjutnya tentang masyarakat pos-sekular. Masyarakat pos-sekular merupakan hasil refleksi dari masyarakat liberal yang sudah matang. Bagi masyarakat pos-sekular, sudah saatnya sekarang, dalam proses demokrasi, juga harus mengikutsertakan warganegara dengan latar belakang religius untuk berpartisipasi, dan tidak begitu saja memblokir alasan-alasan religius yang diberikan. Mereka yang mau datang dalam proses demokratisasi dengan membawa alasan-alasan religius, harus berusaha sedapat mungkin menemukan inti epistemis dari alasan religius itu, yaitu inti yang bisa dimengerti oleh orang-orang dari agama lain supaya bisa dikomunikasikan.

Ambil contoh ini: Suatu kelompok religius yang menerima bunuh diri sebagai tindakan religius yang sakral, tentulah sulit dimengerti oleh kelompok-kelompok lain, sampai kelompok ini memberikan 'alasan rasional' yang ada di balik doktrin tentang bunuh diri itu. Tentu pada akhirnya kelompok pro-bunuh diri ini harus melegitimasi posisinya dalam wawasan rasionalitas hak-hak asasi manusia universal agar dapat diterima secara rasional. Tingkat kesulitan untuk mencapai saling pengertian dalam hal ini tentu sangat tinggi, namun komunikasi rasional itu sendiri sedikit banyak dapat mengubah pandangan-pandangan sempit. Ini contoh ekstrem untuk menjelaskan bahwa dalam diskusi publik kita harus menerjemahkan alasan religius itu menjadi alasan yang lebih rasional. Ada banyak hal lainnya, seperti: praktik korban hewan versus sikap para penyayang hewan, sorban di kepala versus aturan pemakaian helm, dan seterusnya. Era pos-sekular dewasa ini telah membuka ruang diskusi antara pihak-pihak dengan latar belakang religius dan pihak-pihak dengan latar belakang sekular di atas *platform* yang sama, yaitu demokrasi dan pluralisme.

Tetapi bagaimana dengan konteks Indonesia? Seringkali orang mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara agama, sekaligus juga bukan negara sekular. Padahal kalau kita lihat beberapa elemen dasar negara, jelas bahwa negara kita dibangun atas dasar nilai-nilai yang sekular. Itu terbukti dengan kemenangan kelompok nasionalis pada pemilu pertama negara kita. Anda sendiri melihat negara ini seperti apa?

Kita adalah negara yang masih berada dalam formasi. Kita belum menemukan bentuk yang bisa diartikulasikan secara teoretis-epistemologis-

metodologis tentang negara macam apa yang sedang kita jalani ini. Kalau mengatakan bukan negara agama dan bukan negara sekular itu hanya “teologi negatif” untuk menentukan suatu identitas. Kalau bukan negara kapitalis, bukan sosialis, bukan negara agama dan negara sekular, kita akan ditagih untuk menjawab pertanyaan: lalu negara apa? Kalau disebut negara Pancasila, negara pancasila itu sendiri negara apa? Kita harus menjelaskan modelnya. Persisnya, model inilah yang belum terbentuk di negara ini. Model ini masih dalam eksperimen di dalam proses demokratisasi. Kita sedang ditantang untuk menemukan kesepakatan inklusif tentang model yang dapat mawadahi kemajemukan nilai dalam masyarakat kita. Untuk itu memang dibutuhkan tidak hanya kreativitas, melainkan juga kematangan.

Saya justru melihat bahwa proses pembentukannya dimulai dengan gerakan reformasi. Sebelumnya, yang lebih bertindak dalam eksperimen kita adalah sistem politik. Sekarang masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan modelnya. Publik “dari bawah” harus ikut serta membentuk model itu. Kalau kita lihat ke belakang, maka, agaknya, nasib menjadi Indonesia itu terkait dengan multikulturalisme dan pluralisme. Kalau mau membuat modelnya, kita tidak bisa lepas dari pluralisme dan multikulturalisme. Apakah multikulturalisme dan pluralisme ini lebih mempunyai nada dasar

atau tekanan komunitarian atau liberal, hal itu bisa berjalan hilir-mudik dalam zamannya. Kalau melihat negara-negara Asia, tampaknya, tekanan komunitarian akan sangat kuat. Yang saya maksud adalah meskipun masyarakat kita ini majemuk, pluralistik, dan multikultural, kita tetap ingin memberi sedikit banyak sisi substantif tentang keindonesiaan. Suatu

Dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh *system of rights*.

komunitas politis selalu ingin mempunyai kesatuan, warna yang sama. Pancasila tentu merupakan titik-tolak yang visioner untuk menata pluralitas kultural masyarakat kita, artinya lebih komunitarian. Kutub ini akan selalu mempunyai lawannya, yaitu yang liberal. Jika kita mengambil jalan liberal, suatu gagasan induk seperti Pancasila tidak boleh dipahami secara substantivistis sebagai semacam *doctrina domus* (ajaran rumah), melainkan hanya secara kategorial sebagai ruang-ruang interpretasi bebas tanpa sabuk nilai-nilai komunitarian.

Mungkin model yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat yang demokratis, pluralistik, multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal dan toleran. Kita tidak bisa lepas dari horison Islam sebagai agama mayoritas. Pluralitas yang lepas sama sekali dari budaya mayoritasnya itu hampir tidak mungkin. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa rumusan atau model seperti itu mengandung suatu konsekuensi bahwa Islam yang menjadi horison Indonesia haruslah Islam yang toleran dan moderat. Katakanlah 'Islam kultural' dan bukan Islamisme atau Islam ideologis. Islam sebagai horizon kultural tentulah berbeda dari Islam sebagai bentuk politis. Pemisahan antara agama dan negara itu tak bisa ditawarkan, maka Islam kultural yang menjadi horizon itu memberi kontribusi motivasi utama dalam keutamaan-keutamaan publik dalam demokrasi pluralistis. Agama harus menghormati otonomi negara, seperti juga negara harus menghormati otonomi agama.

Bahkan negara liberal Barat pun tetap memiliki nada dasar Kristiani-kultural, kendati lebih pada multikulturalisme dan netralitas kulturalnya. Masalah dalam negeri kita akan muncul kalau Islam-nya menjadi *rigid*. Corak Islamisme macam itu justru akan berbahaya bagi koeksistensi damai dalam kemajemukan. Jika negara menerapkan kebijakan-kebijakan islamistis tanpa mendengar aspirasi minoritas, akan terjadi atomisasi, isolasi, bahkan bisa menjadi *apartheid* dan bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. Nasib menjadi Indonesia adalah menjadi demokrasi pluralistik. Nada dasarnya mau bersifat komunitarian atau liberal, tergantung kekuatan politik yang masuk dan menguasai. Kalau mau komunitarian, nada dasar Islam toleran dan moderat harus ada di dalamnya dan kalau mau liberal, mungkin tendensi modernis Barat yang akan banyak berperan di sana. Tegangan ini sendiri mengasyikkan, karena darinya pemikiran-pemikiran sosial akan tumbuh di negeri ini.

Kendati Anda sudah banyak menyinggung masalah liberalisme, tetapi kami ingin mendapat klarifikasi tentang anggapan banyak orang yang mengartikan liberal sebagai kebebasan tanpa batas dan terkait dengan ekonomi kapitalis yang hanya memberi ruang kepada yang kuat. Itu tentu saja pandangan-pandangan yang sudah dimasuki oleh nilai-nilai tertentu. Menurut Anda apa dan bagaimana sebenarnya liberalisme?

Ada buku yang menarik dari Rainer Forst, *Kontexte der Gerechtigkeit* (konteks-konteks Keadilan). Di situ dikatakan bahwa secara historis memang liberalisme berjalan bergandengan dengan kapitalisme, karena liberalisme juga sebetulnya muncul sebagai *impuls* dari perkembangan filsafat dan ilmu-ilmu alam. Pandangan dunia mekanistik dalam ilmu-ilmu alam membebaskan manusia dari dikte alam dan dari takhayul. Ini disusul dengan emansipasi lain dalam liberalisme, yakni individu terbebas dari dikte kelompok. Karena itu, liberalisme juga terkait dengan proses ekonomi pasar bebas di mana individu boleh berusaha dan usahanya bisa tanpa batas. Batas usaha individu dalam konteks liberalisme itu hanya ketika berbenturan dengan kepentingan orang lain. Maka kepentingan diri, dalam liberalisme, merupakan suatu hal yang tidak diharamkan.

Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, liberalisme dan kapitalisme jelas menjadi dua hal yang berbeda. Mereka yang

Tentang kemajemukan, liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filsuf Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnya kebahagiaan adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi-orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok-kelompok partikular itu.

merespons sisi negatif dari liberalisme, lebih mengacu gagasan tersebut pada abad ke-19, masa awal liberalisme. Liberalisme sekarang berkembang lebih jauh. Dalam buku Forst ini jelaslah bahwa liberalisme sebetulnya bukan kebebasan mutlak tanpa batas dari individu, melainkan suatu konsep hukum. Liberalisme bukan hanya sebuah ideologi, melainkan juga suatu *theory of right*. Dalam konsep hukum, seorang individu akan merasa bebas kalau hak-haknya dijamin secara hukum. Individu mempunyai ruang untuk bergerak karena ada jaminan hukumnya. Namun, untuk mendapatkan hak itu, seorang individu terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum tertentu. Jadi, konsep hak dan kewajiban itu komplementer dalam liberalisme. Dengan kata lain, dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh *system of rights*.

Jadi kelirulah anggapan bahwa liberalisme adalah kebebasan semutlak-mutlaknya. Pada ide liberalisme awal memang ada ide seperti yang dibayangkan para penentang liberalisme di Indonesia. Misalnya pada Thomas Hobbes dalam *Leviathan*. Bagi Hobbes, kebebasan adalah tidak adanya kendala untuk bertindak. Kebebasan dalam arti ini diartikan oleh Hobbes sebagai hak untuk melakukan apa saja. Konsep hak semacam ini disebut *natural liberty*, tapi jelas bukan *civil liberty*.

Kebebasan alamiah semacam itulah yang tersirat pada anarki, yang mungkin menetap pada pikiran orang yang salah mengerti tentang liberalisme. Padahal, konsep Hobbes tentang hak itu sudah dikritik dan diatasi oleh Hobbes sendiri dengan mengatakan bahwa kita tidak mungkin mempertahankan hak alamiah semacam itu dalam liberalisme. Kita harus beralih menjadi *civil liberty*, kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu terjadi lewat kontrak. Sedangkan kontrak itu sendiri terjadi lewat melepaskan hak-hak natural untuk kemudian tunduk kepada hukum bersama. Hak dan kebebasan sipil itulah yang dianut oleh liberalisme. Masyarakat liberal akan tunduk kepada hukum yang dilegislati bersama.

Terkait dengan netralitas negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak individu, bagaimana negara mengupayakan suatu tatanan yang fair, adil bagi semua kelompok?

Fairness dan netralitas dalam bentuk konkretnya adalah tidak memihak kepada salah satu aliran termasuk yang mayoritas. Asas netralitas tidak menghendaki adanya regulasi publik yang dilakukan atas nama agama tertentu tapi mengikat orang dari agama lain. Itu pengertian pertama. Kedua, sebelum ada proses pengambilan kebijakan publik, sedapat mungkin negara mengikutsertakan berbagai macam bentuk kelompok di dalam masyarakat dengan bermacam-macam orientasi nilainya untuk memberikan kontribusi pandangan, sehingga akhirnya ditemukan suatu titik tengah yang bisa memuaskan semua pihak. Semua itu normatif. Pada faktanya, tidak semua keputusan publik akan mencapai titik tengah seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah upaya dan adanya itikad baik untuk mencapai titik tersebut.

Apabila kebijakan publik kita secara terang-terangan memihak kelompok tertentu, dalam

masyarakat plural hal itu akan langsung dilihat sebagai pemihakan. Hal itu justru kontraproduktif. Maka peraturan-peraturan daerah yang berhaluan pada agama tertentu juga bisa kontraproduktif kalau semata-mata untuk memberi isi identitas. Hal itu adalah bentuk dari politik identitas di daerah-daerah dan akan berbahaya bagi negara secara keseluruhan. Regulasi-regulasi daerah semacam itu kontraproduktif karena akan mengundang sentimen masyarakat yang membuat mereka saling mengisolasi diri satu sama lain dengan ongkos raibnya solidaritas nasional. Identitas politis tak seharusnya ditimba dari agama, melainkan seharusnya dari konstitusi republik kita.

Pada level ini negara harus segera bertindak untuk menengahi prosesnya sehingga perda-perda itu lebih berorientasi nasional atau bahkan kosmopolitan. Tetapi suatu masyarakat yang hendak berorientasi nasional

Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif.

Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas kolektif yang dikira berasal darinya.

atau kosmopolitan banyak bergantung pada pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kematangan kebudayaan, kontak dengan bermacam-macam elemen baik di dalam maupun di luar negeri, dan tentunya juga politik. Pemerintah harus sensitif dan tegas terhadap tendensi-tendensi politik identitas yang mulai marak di daerah-daerah.

Salah satu usul untuk menciptakan suatu tatanan ideal yang sering Anda kemukakan di beberapa media dan kesempatan adalah melalui public reasoning. Proses itu sendiri meniscayakan semua komponen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyumbangkan pendapatnya. Kalau dalam praktiknya, dalam konteks Indonesia, bagaimana public reasoning itu dapat dijalankan? Melalui negara atau civil society?

Tidak boleh melalui negara, harus melalui *civil society*. Kalau melalui negara, yang kita dapat hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan, seperti dalam klompencapir di masa Orde Baru. Itu kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saya sangat senang dengan radio-radio yang sudah mulai membicarakan tentang kebijakan presiden, menteri-menteri, bupati dan lain sebagainya, dan kemudian ditanggapi oleh pemirsa atau pendengar dengan sangat cerdas dalam memberikan alasan. Forum-forum seminar di kampus dan hotel-hotel, diskusi-diskusi di dalam surat kabar, LSM dan lain-lain juga vitalitasnya sangat menggembirakan di Indonesia. Jangan salah mengira bahwa diskusi-diskusi publik kita dangkal-dangkal saja. Kalau dibandingkan dengan apa yang ada di negara liberal, saya menduga, kedalaman komentar dan kritik dalam pembahasan persoalan, seperti UU pornografi, mungkin pandangan-pandangan yang dikemukakan masyarakat Indonesia lebih dalam, beragam, dan terbuka. Kita kadang-kadang memandang remeh apa yang ada di negeri kita dan mengagumi yang ada di luar. Padahal, ternyata, apa yang berkembang di Indonesia ini sangat menakjubkan.

Satu hal yang belum ada di Indonesia yaitu upaya untuk mendokumentasi, mengartikulasikan, mengingat dan menjadikan suatu peristiwa sebagai momentum yang selalu diingat bersama, lantas membuat suatu studi komprehensif untuk mengetahui arahnya. Sebut saja, seminar, diskusi dan problem besar yang ada di Indonesia, semuanya hampir hanya seperti *performance* atau *reality show* yang muncul sporadis lalu hilang dilupakan oleh zaman. Tidak ada upaya untuk mencari jalan keluar dan secara

komprehensif menyelesaikan masalah-masalah itu, sehingga kalau suatu ketika ditanya, kita tak mempunyai *progress report* yang jelas mengenainya. Di wilayah inilah orang kita sangat kurang memberikan respons. Mungkin karena masyarakat kita terlalu kompleks, atau karena masyarakat kita hanya senang berbicara namun kurang senang mendokumentasi. Masyarakat kita lebih gemar hidup dalam budaya lisan, kurang membiasakan diri dengan budaya tertulis, mendokumentasikan sesuatu, dan mengembangkannya. Akibatnya, begitu banyak peristiwa dan tragedi kolektif yang tidak terselesaikan karena kita tidak pernah mau membuka dan mendokumentasikannya.

Saya baru saja datang dari Hiroshima, kota yang dulu rata oleh bom dan hanya menyisakan satu gereja dan *dome*, yang mungkin karena konstruksinya lebih kuat dibanding bangunan lain. Sekarang Hiroshima menjadi kota modern dan penduduknya menjadi orang-orang yang anti-perang. Saya mengunjungi satu museum di sana yang isinya dokumentasi lengkap dari jumlah korban sampai cerita individual tentang korban yang dapat diakses melalui internet. Misalnya ada

cerita pengalaman seorang korban pengeboman yang berasal dari Jerman yang terdokumentasi secara lengkap. Ada juga cerita korban tentang anak yang pada saat pengeboman kota itu sedang membawa kotak makanan untuk makan siang. Kotak makannya masih ada dan cerita mengenai anak itu, mungkin melalui cerita ibunya atau orang-orang yang melihat dan tetap *survive*, semuanya lengkap terdokumentasi. Hampir semua rombongan pelajar yang berkunjung ke museum ini adalah anak-anak Jepang. Bagaimana mereka belajar dari sejarah sangatlah menakutkan.

Kita juga mempunyai cerita-cerita seperti itu. Kita punya peristiwa G 30 S/PKI, kerusuhan Mei, dan masih banyak lagi, yang sayangnya tidak pernah selesai diungkap. Orang kita perlu berani untuk jujur terhadap

Untuk menghilangkan totalitarisme agama, masyarakat Barat bertindak eksekutif dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarisme agama.

sejarah, sehingga mampu juga melihat prestasi-prestasi sejarah di samping pengalaman-pengalaman negatif di dalamnya. Sejak reformasi, kita juga mempunyai prestasi-prestasi dalam deliberasi, misalnya kasus tentang RUU-APP (Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi) yang akhirnya direvisi. Artinya, sistem politik kita memperhatikan juga apa yang berkembang di publik. Itu salah satu prestasi deliberasi yang seharusnya juga terdokumentasi secara lengkap. Begitu banyak prestasi deliberasi lain yang harus dianggap sebagai capaian-capaian. Sebut saja kasus-kasus pengadilan HAM yang seharusnya disosialisasikan ke masyarakat. Banyak yang belum terungkap karena kurangnya kedaulatan pengadilan, namun setiap prestasi kecil yang dihasilkan perlu diapresiasi. Untuk terwujudnya semua itu, kita harus mempunyai *knowledge management* yang bagus sehingga sistem pendidikan kita dapat menyerap kejadian itu sebagai pelajaran yang objektif dan mencerahkan. Cerita di bangku-bangku sekolah jangan lagi hanya memuat cerita masa lalu, tetapi juga yang sekarang: prestasi deliberasi kita apa saja, apa yang menjadi demokratis, kebebasan pers bagaimana, dan sebagainya. Tentu semua ini harus berasal dari bawah. Jika tidak demikian, hal itu tak lebih daripada propaganda pemerintah lagi.

Public reasoning merupakan mekanisme yang hanya mengakomodasi wacana yang rasional. Bukankah hal ini sama artinya dengan upaya mengeksklusi atau meminggirkan pandangan-pandangan lainnya yang tidak rasional?

Jika Anda mempunyai seorang teman yang sedang marah. Salah satu sikap yang mungkin Anda lakukan adalah diam. Karena kalau diajak bicara, hasil pembicaraannya juga mungkin tidak akan produktif. Namun yang harus diperhatikan, orang yang marah itu pada dasarnya ingin menyampaikan sesuatu supaya Anda dengar. Cara yang memungkinkan itu, dia harus menenangkan diri terlebih dahulu untuk tidak marah kemudian baru berbicara. Kalau marah terus-menerus dia tidak pernah akan dapat menyampaikan apa yang dia inginkan, lalu kita tidak akan pernah saling mengerti. Jadi langkah yang harus dilakukan dalam kasus itu, *pertama*, Anda harus diam supaya dia tenang. Dan *kedua*, dia juga

harus menenangkan diri supaya bisa berbicara. Pada akhirnya *toh* dia juga bicara.

Kalau perumpamaan itu saya transfer ke dalam kehidupan bersama secara politis, kelompok-kelompok radikal di masyarakat adalah ibarat orang yang sedang marah. Mereka merasa dirugikan dan dimarginalisasikan. Tetapi sebenarnya mereka mau berbicara. Hanya saja, bicara dalam kemarahan adalah kontraproduktif. Oleh karena itu, mereka harus terlebih dahulu menenangkan diri. Harus mencari alasan rasional untuk bisa menyampaikan pesannya. Sebaliknya, kita yang mendengarkan juga harus menenangkan diri, jangan mengajak bicara terus-menerus karena hanya akan menghasilkan hal yang kontraproduktif dan hanya akan menyulut terjadinya perkelahian. Artinya, selama kelompok-kelompok radikal ini emosional dan menggunakan alasan-alasan yang tidak rasional, maka tidak akan pernah bisa memulai pembicaraan, selama itu pula tertundalah komunikasi. Tetapi hal itu merugikan kedua belah pihak. Maka, sekali lagi, dalam konteks hidup bersama secara politis, pihak yang sedang marah, agar gagasannya bisa diterima, harus terlebih dahulu menenangkan diri dan mencari argumen.

Pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama.

Dalam demokrasi tidak ada jalan lain selain menjadi masyarakat yang rasional. Namun rasionalitas sendiri mempunyai berbagai macam variasinya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam konteks ini adalah rasionalitas publik. Melalui rasionalitas inilah sikap dan tindakan seseorang dapat dimengerti oleh publik. Melalui rasionalitas ini juga tindak kekerasan terhadap yang lain menjadi sesuatu yang terlarang. Kekerasan hanyalah efek dari frustrasi, dan frustrasi terjadi karena defisit rasionalitas. Defisit rasionalitas muncul karena kepanikan yang ada di dalam jiwa seseorang. Sedangkan sikap panik sendiri muncul karena marginalisasi dalam masyarakat.

Jadi terhadap alasan yang tidak rasional, dalam konteks demokrasi, ada dua sikap yang bisa dikedepankan. *Pertama*, menunda komunikasi

sampai lawan menemukan alasan rasional untuk berbicara dengan kita, dan kita sendiri menenangkan diri untuk mencoba mendekati lawan supaya dicapai titik temu yang saling bisa mendekati. Dan kemungkinan *kedua*, selama lawan yang emosional tidak sabar dan tetap melakukan kekerasan, polisi harus turun tangan. Dalam demokrasi, kita membutuhkan polisi yang kuat. Kalau polisi sudah bersikap netral, aktif, dan adil, keamanan akan bisa ditegakkan.

Jadi, mungkinkah dalam konteks Indonesia kesepakatan melalui public reasoning bisa dicapai, kalau pada faktanya Indonesia terfragmentasi sebegitu rupa sehingga sangat sulit menemukan titik temu?

Ini masalah yang sangat pelik. Tetapi, untuk tidak mematahkan harapan, dalam buku Niklas Luhmann *Soziale Systeme* (Sistem-sistem Sosial), ada suatu formula yang sangat penting bahwa sistem merupakan ‘reduksi kompleksitas’. Kalau masyarakat kita begitu kompleks, dan kompleksitas itu tidak direduksi, kita tidak akan pernah lepas dari krisis. Salah satu jalan untuk mereduksi kompleksitas adalah sistem manajerial negara yang bersih, *good governance*, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial masyarakat. Adanya berbagai macam pandangan di dalam masyarakat tidak akan menghabisi negara. Tidak membuat negara menjadi bubar. Mengapa? Mungkin jawabannya karena kita tetap memiliki kepentingan bersama, yaitu ingin fasilitas publik bersama, jalan-jalan umum yang tidak macet, ingin birokrasi negara yang tidak memihak, urusan surat-surat yang bebas korupsi, mengurus tanah mudah dan baik, mengurus izin usaha juga lancar, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara dengan macam-macam orientasi nilai tetap ingin mempunyai satu *platform* bersama hingga bisa saling kita mengerti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jangan membayangkan seolah-olah negara modern itu bisa menjadi monolitik seperti komunitas adat, karena bayangan itu juga berbahaya jika menjadi kebijakan politis. Yang perlu dicari adalah tatanan bagi pluralitas.

Apa yang disebut kepentingan bersama ini akan tetap ada. Salah satu kepentingan bersama yang tetap ada adalah bahwa seluruh pihak ingin menjadi masyarakat yang demokratis dan pluralistis. Kalau pemerintahnya

konsisten pada wilayah itu, disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan keadilan distributif yang baik, beragam pandangan pun akan bisa dikoordinasikan dan dimobilisasi untuk sepakat pada negara. Artinya, negara akan menjadi milik bersama. Tetapi kalau itu gagal, kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan negara (pemerintah) akan merasa mempunyai alternatif untuk memberikan solusi. Itulah bagian dari dinamika politik. Bisa saja suatu kelompok menawarkan suatu solusi, meskipun, bisa jadi, nantinya akan dilawan oleh kelompok lain. Namun demikian substratumnya adalah bahwa kita tetap ingin plural, di mana dalam pluralitasnya kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dengan keadilan distributif yang dapat dinikmati oleh setiap orang.

Pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu.

Tentang perbedaan ideologi dan sebagainya, lama-kelamaan, dalam prosesnya, akan menjadi tidak begitu sentral lagi. Seperti dalam negara maju, perbedaan ideologi sudah tidak menjadi soal hidup dan mati, tetapi hanya menjadi cara berpikir. Masyarakat pada fase itu sudah berada pada tingkat moderasi tertentu. Kita belum mencapai tingkat itu, dan perlulah keyakinan bahwa suatu saat kita juga akan mencapainya.

Dapatkah Anda mengomentari, pertama, perihal masa depan kemajemukan Indonesia yang iklimnya semakin tidak menggembirakan, terutama ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan pluralisme, dengan salah satu alasan bahwa pluralisme dapat berakibat pada sinkretisme, pembauran aneka ragam agama dan keyakinan menjadi satu, sehingga tidak jelas lagi yang mana iman Islam yang murni, yang mana Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya, sehingga dapat mendangkalkan iman umat; kedua, pluralisme yang juga dinilai negatif karena hanya akan menghasilkan relativisme?

Pemahaman pluralisme seperti itu sangat spesifik MUI. Dan perlu ditekankan di sini juga bahwa MUI adalah suatu lembaga dengan *adresat*-nya umat Islam. Dalam konteks itu, berarti MUI bicara *pro-domo*, untuk rumah, bukan untuk publik, bukan untuk orang-orang dari agama lain. Institusi agama memang biasa seperti itu, karena mempunyai kepentingan

untuk integritas dan memberi identitas pada umatnya. Persoalan di Indonesia menjadi merembes ke mana-mana lantaran Islam menjadi mayoritas dan di kalangan Islam sendiri mungkin belum mempunyai kesepakatan mengenai sekularisasi (apakah agama dan politik itu dipisah atau tidak). Kalau di dalam gereja Katolik dan Protestan perihal sekularisasi sudah disepakati sejak lama. Sehingga kalau pemimpinnya mengatakan: “Lawan *New age!* atau lawan posmodernisme!” hal semacam itu akan ditanggapi sebagai masalah moral dan pembinaan iman, dan bukan masalah politik. Masalah di MUI juga seperti itu, yang lalu dikaitkan dengan politik, kelompok lain, dan sebagainya. Sejauh umat Islam bisa menyikapi bahwa itu adalah fatwa *pro-domo*, tidak masalah. Itu persoalan intern, diskursus dalam Islam di Indonesia. Saya tidak bisa menanggapi perdebatan itu. Tetapi kalau fatwa itu dimaksudkan untuk seluruh masyarakat, saya keberatan, karena pluralisme tidak sama dengan sinkretisme dan relativisme.

Lebih dari itu, sinkretisme bukan sesuatu yang mempunyai konotasi negatif. Dalam tingkat tertentu, agama-agama juga sinkretis. Setiap agama juga berdialog dan menghasilkan pencampuran tertentu dengan kebudayaannya. Meski setiap agama juga mempunyai suatu pretensi untuk murni dari budaya. Itu pretensi. Sementara faktanya setiap agama selalu tercampuri budaya tertentu. Kita bisa mengatakan bahwa mereka yang berpretensi murni sebenarnya hanya berpretensi untuk membentuk kebudayaan sendiri, yaitu kebudayaan puritan. Puritanisme bukan budaya hakiki, melainkan tetap salah satu bentuk kultural.

Karena itu, sulit untuk menerima begitu saja bahwa pluralisme dan sinkretisme secara umum negatif. Tetapi kalau fatwa itu diucapkan *pro-domo*, berarti hanya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan spiritual. Kalau ini diterima umatnya, maka *no problem*. Tetapi kalau umatnya sendiri memberikan respon yang bertentangan dengan fatwa, itu tanda bahwa sebenarnya di situ terdapat masalah.

Banyak yang mengatakan bahwa pluralisme, dalam konteks Indonesia yang cukup majemuk ini, adalah suatu keniscayaan. Kira-kira model pluralisme seperti apa yang dalam pandangan Anda lebih santun dan bisa merawat kemajemukan tanpa ada pertikaian dan sebagainya?

Pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan tentang MUI. Sekarang kita berada di luar konteks *pro-domo*. Pembedaan publik dan privat tetap berguna, meskipun jangan terlalu *rigid*. Ketika kita berhadapan dengan konteks pluralisme di Indonesia, dengan kemajemukan agamanya, maka yang harus masuk adalah wacana nasional, bukan wacana agama. Tetapi jika untuk kalangan intern, wacana agama jelas diperbolehkan. Sebut saja kalau sebuah seminar dihadiri oleh orang dari bermacam-macam agama, maka kita tidak bisa berbicara hanya dalam terminologi agama sendiri. Harus ada *platform* bersama yang kita sepakati sebagai bangsa, *demos*, warga negara.

Modelnya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, sejarah membuktikan bahwa pluralisme dikehendaki sejak awal oleh masyarakat kita. Tadi saya katakan, nada dasarnya bisa kita pilih, entah komunitarian atau liberal – yang dalam hal ini bisa hilir-mudik. Yang saya maksud komunitarian adalah ada warna kultural Islam yang menjadi horison utamanya, dan perlu diingat, Islamnya bukan yang islamisme, melainkan yang

toleran, Islam kultural. Hal itu akan bisa kita terima bersama. Bahkan orang Kristen yang ke luar negeri juga mengatakan bahwa mereka berasal dari masyarakat dengan mayoritas Islam, namun demikian mereka sebagai Kristen merasa mendapatkan ruang untuk berekspresi di Indonesia. Oleh karena itu, orang Kristiani Indonesia merasa berasal dari latar belakang kultur Islam dan tahu bagaimana Islam di Indonesia. Sungguhpun begitu mereka tidak merasa bahwa dengan cara demikian, lantas akan beralih iman menjadi Islam. Mereka adalah seorang Kristen yang memahami kultur Islam di Indonesia.

Tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama.

Seringkali militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pengumpulan iman sejati para warganegara yang religius.

Atau, pilihannya kita menjadi liberal sama sekali. Artinya, kita tidak sama sekali berbicara tentang Islam. Ini adalah negara Republik Indonesia yang sekular. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa seperti itu? Tentunya hal ini tergantung kekuatan politik mana yang mau bergerak. Tampaknya kalau melihat dasawarsa-dasawarsa yang lalu, nada dasar komunitarianlah yang lebih diambil, meskipun hal itu tetap menggelisahkan mereka yang mencintai kebebasan individu. Indonesia akan memiliki wajah liberal jika makin banyak individu yang menghargai kebebasan dirinya dan kebebasan orang lain. Selera akan kebebasan ini belum cukup tampak, sementara banyak orang mencari tambatan pada komunitas dan otoritas.

Dalam perkembangan pemikiran, terutama di Barat, ada kecenderungan membenturkan antara pluralisme dengan monisme, yang dalam agama tercermin lewat semangat monoreligius dengan karakter menyingkirkan perbedaan agama dan keyakinan ke dalam paham agama yang tunggal. Demikian pun yang terjadi di negeri ini, di mana banyak kalangan warga yang melihat Indonesia hanya terjebak pada perbedaan-perbedaan besar, Islam-Kristen, Jawa-sunda, dan tidak melihat pada yang lebih mendasar, yaitu perbedaan-perbedaan nilai di masing-masing komunitas yang teramat plural. Bagaimana pandangan Anda tentang itu semua?

Semua itu, pada dasarnya, masalah stereotipifikasi kategori-kategori sosial. Dalam buku Clifford Geertz yang saya baca edisi Jermanya, *Die Welt in Stücken* (aslinya dalam bahasa Inggris. Artinya: Dunia yang Tercabik-cabik), ditunjukkan bahwa apa yang dikatakan Samuel P. Huntington tentang benturan peradaban, yang mana seolah-olah Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konfusianis merupakan kategori-kategori monolitik yang saling dibenturkan. Geertz membuktikan bahwa yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian. Peradaban yang dibentuk oleh agama-agama itu dan praktik agama-agama itu sendiri tidaklah monolitik, melainkan sangat pluralistik. Dalam buku tersebut ditunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu contoh di mana begitu banyak kemajemukan yang terbangun dari sejarahnya, yakni formasi lapisan-lapisan nilai yang berasal dari etnisitas, bahasa, agama, birokrasi kolonial, modernitas dan seterusnya. Kalau melihat seperti itu, benturan antara monisme, dan pluralisme di negeri kita, seperti yang Anda katakan itu, merupakan akibat

tidak memahami fakta pluralitas negeri ini. Kita semua yang mendiami kepulauan nusantara ini mau tidak mau harus mengambil sikap pro-pluralisme, jika mau hidup bersama secara damai.

Sekarang persoalannya apakah pluralisme merupakan suatu kondisi yang kemudian hanya kita biarkan. Artinya, kita pasif dan tidak melakukan aksi sama sekali, atau kita mempunyai suatu proyek untuk memobilisasi sedemikian rupa sehingga pluralisme berada dalam tatanan tertentu yang bisa menjamin keutuhan sebuah masyarakat. Saya cenderung pada yang kedua. Pendapat yang pertama cenderung pada sikap *laissez-faire*, membiarkan pluralisme menjadi liar terpecah-pecah dan tidak saling mengerti satu sama lain. Dari sini akan terbentuk isolasionisme. Membentuk ‘pulau-pulau’ yang tidak saling mengerti satu sama lain. Maka dari itu pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu. Jika di dalam sebuah agama, misalnya,

Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi *laissez faire* terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi.

terdapat bermacam-macam aliran atau sekte, sekurang-kurangnya ada suatu organisasi yang cukup fleksibel yang mencoba mendekatkan mereka untuk saling mengerti. Gerakan-gerakan solidaritas semacam gerakan ekumene dalam kekristenan adalah salah satu contoh upaya untuk saling mengerti di antara yang terpecah.

Fleksibilitas itu harus ditunjukkan sebagai gerakan solidaritas kemanusiaan yang inklusif, dan bukan sebagai kontrol atau dominasi doktriner. Kita tidak harus mereduksi pluralitas, melainkan menatanya. Gerakan untuk saling mengerti ini tidak boleh mengeksklusi pihak-pihak yang terlepas jauh, yakni yang sangat berbeda dari mayoritas, karena sikap eksklusif macam itu justru akan meradikalkan sikap pihak yang dieksklusi. Sikap yang tepat adalah mengajak bicara sambil membiarkan berkembangnya suatu kategori

yang lebih inklusif untuk menampung pluralitas. Kemampuan dan kemauan untuk bersikap inklusif ini tentu saja banyak tergantung pada sejarah identitas dan kedewasaan umat. Begitu juga pluralitas kultural dalam masyarakat kita perlu ditata secara inklusif dan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui tembok-tembok agama, suku, ideologi, ras, dan seterusnya.

Apakah semua yang Anda paparkan tersebut terkait dengan proyek besar menuju apa yang Anda sebut sebagai toleransi militan?

Toleransi militan itu suatu konsep embrional yang lahir prematur, karena belum saya pikirkan secara sistematis. Inti dari konsep itu sendiri berangkat dari anggapan bahwa setiap orang mempunyai iman, keyakinan dan paham tentang kebenarannya sendiri-sendiri. Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawarkan lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat. Sebagai suatu keyakinan yang menyentuh fondasi eksistensial manusia, agama memang cenderung menjadi sistem pandangan dunia yang absolut. Akan tetapi dalam agama manapun, juga yang sangat eksklusif, terkandung pandangan tentang kemanusiaan yang membuka diri terhadap bangsa-bangsa dan agama-agama lain. Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif. Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas kolektif yang dikira berasal darinya.

Toleransi militan yang saya maksud adalah bahwa meskipun kita mempunyai identitas dari agama tertentu, tidak berarti kita tidak toleran. Tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama. Seringkali militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan

untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pengumpulan iman sejati para warganegara yang religius. Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi *laissez faire* terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi. Toleransi militan adalah sebuah posisi inklusif yang mau relaks terhadap tendensi-tendensi triumphalistis dalam setiap agama. Relaks berarti berironi seperti seorang dewasa yang merasa geli mengenang kepicikan yang dilakukan di masa kanak-kanaknya.

Maka itu, tidaklah mengherankan bahwa dalam perbandingan spiritual, seorang rohaniwan Muslim yang memiliki kedalaman spiritual dan seorang rohaniwan Kristani atau Budhis yang juga sangat dalam spiritualitasnya akan dapat berjumpa satu sama lain untuk kemanusiaan, meskipun mereka melihat dari perigi rohani yang berbeda-beda. Bertolak dari keyakinannya dan

dari pengalaman mistiknya sendiri-sendiri, seorang beragama yang sangat tinggi spiritualitasnya dapat menemukan mistik kemanusiaan yang sama. Jadi, *platform* kemanusiaan di semua agama pada dasarnya sama. Mereka bisa bertemu satu sama lain. Persoalan kenapa umat kebanyakan malah saling bertengkar, tak lain karena ajaran-ajaran religius telah diideologisasi dan membentuk sikap doktriner dan dogmatis yang ekstrem bagi umat. Sikap ini yang bisa membentuk umat menjadi militan dan tidak toleran. Atau militan atau *laissez-faire* bukanlah sebuah pilihan real bagi toleransi militan. Militansi politis atas dasar agama seringkali justru berasal dari kurangnya kedalaman iman. Sebaliknya, sikap *laissez-faire* kerap merupakan

Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawar lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat.

bukti ketidaktekunan dalam beriman. Toleransi militan memadukan kesalehan religius dan humanisme universal.

Setelah pemaparan panjang lebar di atas, bagaimana Anda melihat pluralisme di Indonesia ke depan? Apakah ada harapan bahwa pluralisme Indonesia akan menuju pada arah yang lebih cerah atau justru Indonesia akan semakin terancam dengan disintegrasi dan sebagainya? Cukup banyak alasan untuk pesimis, meski juga masih banyak alasan untuk optimis.

Sulit untuk memastikan akan seperti apakah Indonesia ini ke depan. Tapi kalau ingatan dan memori masyarakat kita cukup kuat, maka akan terlihat benang merah dalam sejarah, dan benang merahnya adalah kebersamaan dalam kemajemukan. Tampaknya di samping alasan yang sangat pesimis bahwa mungkin ada segmen-segmen radikal-ekstrem dalam masyarakat kita yang sewaktu-waktu dapat mengambil alih kekuasaan dan sebagainya, tetap ada alasan untuk optimis bahwa benang merah itu menunjukkan tendensi pluralisme yang cukup kuat. Itu bergantung pada banyak faktor, baik intern maupun ekstern. Termasuk ke dalam faktor ekstern ini adalah politik internasional dan politik HAM yang sewaktu-waktu bisa menekan kalau ada rejim militer atau rejim fundamentalis yang mengambil alih kekuasaan di suatu negara.

Jadi, benang merah itu akan memberi suatu harapan buat Indonesia bahwa ke depannya kita akan tetap bergerak pada jalur masyarakat majemuk, meskipun ini juga sebuah perjuangan. Orang-orang yang toleran dan berpikiran pluralis, yang sebenarnya bagian mayoritas dari masyarakat kita, harus semakin berani berbicara. Mereka sekarang adalah *the silence majority* yang harus mendapat akses lebih besar untuk berbicara dan menolak segala macam bentuk intoleransi dan monisme di negara ini. Inilah yang saya tulis dalam buku saya *Memahami Negativitas* (Kompas, 2005). Masyarakat kita itu mudah diprovokasi, karena banyak yang termarginalisasi. Mereka yang termarginalisasi kemudian menjadi panik dan mudah terprovokasi dalam gerakan-gerakan massa. Dalam masyarakat kita, bahkan di dunia pada umumnya, ada kelompok yang dapat memanfaatkan situasi seperti ini dengan sangat baik.

Ada pihak-pihak dalam masyarakat kita yang secara cerdas dapat memprovokasi massa, dengan memainkan politik uang dan sebagainya,

serta dapat menggerakkan semuanya dalam proses demokrasi, mungkin dengan semboyan pembersihan dari korupsi atau mencitrakan diri sebagai rejim yang jujur meski diarahkan oleh kepentingan ideologi tertentu. Situasi seperti itu juga yang terjadi dalam fasisme. Suatu bahaya yang juga tidak tertutup bagi masyarakat kita. Maka kelompok yang dapat memanfaatkan situasi itu akan muncul sebagai pesona baru, sebagai rejim yang cukup bersih namun keras, dan secara diam-diam akan membawa seluruh masyarakat ini pada ideologi yang diperjuangkannya. Itu bahaya dan kita harus terus mewaspadainya. Menurut saya, rejim monistis yang mungkin bersih dari korupsi itu, jika ada, akan berlangsung sementara saja. Setelah keuntungan yang diinginkannya diperoleh, mereka akan membawa masyarakat kepada maksud-maksudnya yang semula. Di situ kebebasan dan pluralisme dirugikan. Sekarang kita berada dalam situasi yang seperti itu. Menegangkan. Jadi, dua benang merah itu terdapat di negara kita. Kebebasan kita sebagai warga negara diberkati oleh pluralitas masyarakat kita, tetapi pada saat yang sama bahaya homogenisasi tetap mengancam, karena banyak kelompok dalam masyarakat kita masih dapat digerakkan sebagai “massa”.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 12 Juni 2007